

BAB III

PRAKTEK PARADIPLOMASI DI YOGYAKARTA

Bab ini akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang muncul dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terutama menyangkut praktek kerjasama internasional Yogyakarta. Secara khusus peneliti menentukan daerah istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang aktif dalam menjalin kerjasama dengan pihak asing atau kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah kerjasama *sister province*. Berdasarkan visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu membangun peradaban berbasis nilai-nilai humanisme dengan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan berkarakter yang ditopang dengan pengetahuan *culture*, pelestarian dan pengembangan *result cultur e* budaya, serta *values culture*. Maka Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini berupaya untuk mewujudkan visi-misi nya tersebut melalui kerjasama luar negeri yang dilakukan.

A. Praktek Paradiplomasi Di Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU Otonomi Daerah dan UU Keistimewaan Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu daerah yang aktif dalam menjalin kerjasama luar negeri dengan pihak asing. Kerja sama itu meliputi Kerja sama ‘sister Province/city’ dengan asing provinsi lain, maupun kerja sama itu telah dirintis jauh sebelum era otonomi daerah karena adanya kedekatan antara para pemimpin di DIY dengan Pemimpin di Negara asing, misalnya kedekatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana IX dengan Gubernur Kyoto Prefektur, Jepang, yang dulunya

pernah melakukan tugas militer di Yogyakarta, dan kerja sama DIY dengan Provinsi Ismailiya, Republik Arab Mesir.

Setelah erah otonomi daerah, perluasan kerja sama Pemprov DIY dengan provinsi-provinsi luar negeri atau swasta asing terus berkembang, antara lain dengan Provinsi Tyrol, Austria Tahun 1999, Suruga Miyagawa Company Tahun 2001, Berndhard Ltd, Malaysia, Tahun 2003, Chugcheongnam-Do, Korea Selatan Tahun 2004, dengan Provinsi Geongsangbuk-Do, Korea Selatan, Tahun 2005, dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, Tahun 2007, Kerja sama dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan Tahun 2009, Kerja sama khusus bidang kesehatan dengan Medical Peace Fundation (MPF), Korea Selatan, Tahun 2007, dengan Provinsi Saint Petersburg, Rusia, Tahun 2010 (latter of intent).⁶³ dengan Juma' Al Majid Center untuk Peradaban dan Warisan Budaya di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Orientalisches Institute Universitiet Leipzig, Jerman di bidang Ilmu dan Budaya, DIY dengan Dongbu Engineering Korea tahun 2012, DIY dengan Pemerintah Kayseri, Turki 2013

Letter of Intent on Friendly Cooperation antara DIY dengan Pemerintah Kota Shanghai, RRT 2013, DIY dengan Pemerintah Kota Shanghai 2014, DIY dengan Adeleide Festival Centre Trust, Australia 2015, *Reaffirmation of The Friendly Relations Agreement* DIY dengan Kyoto Prefecture, Jepang 2015, *Reaffirmation of The Memorandum of Understanding* antara DIY dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan 2015, *Letter of Intent on Friendly Cooperation* DIY dengan Prefektur Yamanashi, jepang, 2015. *Implementing Arrangement* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Saemaul Global Foundation, Gyeongsangbuk do, Korea Selatan 2016. *Memorandum of Understanding* DIY dengan Shanghai, RRT 2016, *Letter of Intent on Friendly Cooperation* DIY

dengan Prefektur Yamanashi, 2015. *Letter of Intent* DIY dengan Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie Suriname. *Memorandum of Understanding* DIY dengan Pemerintah Negara Bagian Victoria 2016, *Implementation of Arrangement* antara DIY dengan Pemerintah Prefektur Yamanashi 2017.⁶⁴

Sampai pada tahun 2017 Pemda DIY telah menjalin kerja sama dengan pihak asing lebih dari 22 Kerja sama, lebih dari 12 negara asing. Kerja sama ini ada yang berbentuk kerja sama kompleks multipurpose dan tertuang dalam dalam Memorandum of Understanding, namun juga ada yang berupa kerja sama teknis atau kerja sama tertentu saja dengan pihak swasta asing. Atau perguruan tinggi asing, dari kerjasama tersebut tentu ada yang produktif dan ada pula yang kurang produktif, atau bahkan tidak berjalan.

B. Perjanjian Internasional Oleh Pemerintah Daerah

Perjanjian internasional adalah sebuah kesepakatan yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dengan tujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. jadi pertama-tama termasuk di dalamnya perjanjian antara negara-negara. Disamping itu, perjanjian antara negara dengan organisasi internasional (misalnya antara Amerika Serikat dengan PBB di New York) dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, juga dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara Takhta Suci dengan negara-negara, walaupun yang diatur dalam perjanjian itu semata-mata urusan gereja dan bukan urusan kenegaraan, karena Takhta Suci merupakan subjek hukum yang diakui dalam hukum internasional.

⁶⁴ data BKPM DIY, 2018.

Hukum internasional dewasa ini ada kecenderungan mengatur hukum perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional atau antara organisasi internasional dengan subjek hukum internasional lain secara tersendiri. Kecenderungan yang disebabkan oleh perkembangan yang pesat dari organisasi internasional di lapangan ini dan adanya ciri khusus perjanjian yang diadakan badan-badan demikian tampak misalnya dalam Konferensi Internasional mengenai Hukum Perjanjian Internasional yang diadakan di Vienna pada Tahun 1968. Konvensi Hukum Perjanjian Vienna dengan tegas menyatakan bahwa konvensi ini hanya mengatur perjanjian yang diadakan oleh organisasi-organisasi atau badan internasional secara tersendiri.

Dalam pengertian yang dipakai dalam Pasal 2 Konvensi sebuah perjanjian internasional bisa diartikan sebagai suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengadakan hubungan diantara mereka yang diatur oleh hukum internasional. Memang istilah traktat dapat dianggap sebagai nama umum dalam hukum internasional dan dapat mencakup perjanjian antara organisasi-organisasi internasional disatu pihak dan sebuah negara di pihak lain meskipun harus diingat bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tidak berlaku terhadap instrumen lain tersebut, melainkan menunjuk pada perjanjian antara negara-negara yang dibuat dalam bentuk tertulis. Di lingkungan internasional, perjanjian itulah yang digunakan untuk hampir setiap jenis perbuatan hukum atau transaksi, mulai dari persetujuan yang sifatnya bilateral semata-mata antara negara-negara sampai suatu perjanjian yang sifatnya paling pokok seperti instrumen konstitusi multilateral sebuah organisasi internasional. Hampir dalam semua kasus, tujuan

sebuah perjanjian internasional adalah untuk membebaskan kewajiban-kewajiban yang mengikat terhadap negara-negara pesertanya.⁶⁵

Praktek pembuatan perjanjian internasional dewasa ini telah melahirkan bentuk perjanjian internasional yang kadangkala berbeda-beda pemakaiannya oleh negara-negara pengguna. Pemahaman negara satu bisa jadi akan berbeda dengan negara lain mengenai satu bentuk perjanjian internasional. Adapun bentuk perjanjian internasional yang banyak dipergunakan oleh negara-negara di dunia adalah sebagai berikut:⁶⁶ Traktat (*treaties*), Konvensi (*Convention*), Persetujuan (*Agreement*), Piagam (*Charter*), Protokol (*Protocol*), Deklarasi (*Declaration*), dan Memorandum Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)

Untuk Di Indonesia, perjanjian internasional diatur dalam UU No. 24 Tahun 2000. Perjanjian internasional menurut UU No. 24 Tahun 2000 adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional serta dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Undang-undang tentang perjanjian internasional ini sebenarnya merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis.

⁶⁵ Kedudukan Perjanjian Ekonomi Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional, hal 11.

⁶⁶

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 memberikan kewenangan pada daerah untuk membuat perjanjian internasional. Hal ini tampak dalam Pasal 5 yang menetapkan bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri. Mekanisme konsultasi dengan menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi menteri luar negeri sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam undang-undang tentang perjanjian internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antardepartemen atau komunikasi surat-menyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional.⁶⁷

Kebebasan untuk melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri, tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang lebih meningkat sejalan dengan kehendak daerah otonom dan kabupaten dan kota untuk memperoleh nilai tambah bagi daerah otonom yang bersangkutan. Hal ini merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penuh dengan tantangan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.

⁶⁷ *Ibid*, hal 12.

C. Perjanjian kerja Sama Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pihak Luar Negeri.

Sampai saat ini ada lebih dari 8 Pemerintah Provinsi dan 47 Pemerintah Kota dari 34 Provinsi di Indonesia yang telah melakukan kerja sama *sister city/province*. DIY termasuk salah satu daerah yang aktif dalam menjalin Hubungan Luar Negeri *sister province* dengan provinsi di Negara lain. Bereberapa Kerjasama ini bahkan telah dirintis jauh sebelum era otonomi daerah, seperti *sister province* DIY dengan Kyoto pada tahun 1985. Hal itu dikarenakan adanya kedekatan antara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Kyoto, Jepang, yang dahulu pernah melakukan tugas militer di DIY. Kerja sama *sister province* DIY dengan Kyoto merupakan yang paling tua dan produktif, karena adanya ikatan sejarah. Sebagai sebuah warisan dari Sultan Hamengkubuwono IX kepada Sultan Hamengkubuwono X, maka kerja sama ini diupayakan tetap bisa dilanjutkan hingga di masa mendatang.

Selain dengan Kyoto, Provinsi DIY telah menjalin kerja sama *sister province* dengan Provinsi Ismailia, Mesir pada tahun 1991; Tyrol, Austria tahun 1999; Negara Bagian California, Amerika Serikat tahun 1997; Provinsi Chungcheongnam-Do, Korea Selatan tahun 2004; Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan Tahun 2005; dengan Chiang Mai, Thailand tahun 2007, dengan Gangwon, Korea Selatan tahun 2009, kerja sama itu tertuang dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MOU). Namun, ada juga yang masih berupa *Letter of Intent* (LOI) yaitu dengan Provinsi Saint Petersburg, Rusia pada tahun 2010, dan Provinsi Shanghai, Tiongkok, serta Provinsi Kayseri, Turki pada tahun 2013.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, hal. 109.

1. Kerja Sama *Sister Province* DIY Dengan Prefektur Kyoto, Jepang.

Kedekatan dan hubungan Provinsi DIY dengan Prefektur Kyoto Jepang dapat dianggap sebagai hubungan yang bersifat istimewa, disebabkan oleh faktor historis yang melatarbelakanginya. Kerja sama *sister province* antara Provinsi DIY dan Kyoto, Jepang, secara resmi terjalin dalam *Agreement for The Establishment of Friendly Relations* atau Persetujuan untuk Pembentukan Hubungan Kerja Sama Persahabatan yang ditandatangani oleh Paku Alam VIII selaku Wakil Gubernur dan Yukio Hayashida selaku Gubernur Prefektur Kyoto, Jepang pada tanggal 16 Juli 1985 di Kyoto. Masa kerja sama ini tidak diatur, karena Prefektur Kyoto menganggap kerja sama Persahabatan itu sifatnya kekal atau selamanya.⁶⁹

Program kerja sama ini meliputi berbagai bidang, yakni seni dan kebudayaan, pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pariwisata, serta industri. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan dan telah terlaksana, antara lain:⁷⁰

- a. Pengiriman petugas untuk belajar teknik konservasi pelestarian lingkungan cagar budaya. Para personil yang telah dilatih di Jepang dalam bidang konservasi cagar budaya telah dapat membantu melaksanakan renovasi beberapa cagar budaya di Yogyakarta.
- b. Penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Tamansari, Kota Gede, Situs Gamping, dan Candi Ratu Boko.
- c. Pengiriman misi kesenian di Kyoto.

⁶⁹ Agustinus Supriyanto dan Andi Sandi A.T.T., *pengembangan Potensi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kerja sama Sister Province*, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hal.15.

⁷⁰ Alam S Anggara. *Yogyakarta Sister City. Op Cit*, hal. 109.

- d. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa (khususnya Sastra Jepang, ada 21 orang tiap tahunnya) Yogyakarta, dan pemberian beasiswa untuk belajar ke Jepang.
- e. Menerima tenaga ahli teknik pertanian dari Jepang.
- f. Doa bersama untuk perdamaian dunia. Kegiatan doa bersama tersebut telah menarik minat rombongan utusan dari *Internasional Zen Exchange Friendship (IZETA)* Kyoto, Jepang, diikuti oleh lebih kurang 189 orang pemuka agama Provinsi DIY dan Kyoto pada tahun 2002.
- g. Pengiriman petugas untuk belajar budidaya hortikultura di lahan kering dan kultur jaringan. Mereka mengikuti kursus kultur jaringan yang kemudian diikuti dengan pemberian alat dari Kyoto. Laboratorium tersebut kini berada di BBI Wonocatur, Sleman, Yogyakarta.
- h. Pertukaran mahasiswa.
- i. Lomba dan pameran dalam rangka pertukaran lukisan anak DIY-Kyoto.
- j. Pengiriman petugas untuk mengikuti *training* di bidang otomotif, kelistrikan, pemipaan, pengeplatan, pengelasan.
- k. Menerima *expert* atau tenaga ahli di bidang pariwisata (awal tahun 2003), dua orang memberi pelatihan *marketing*.
- l. Mengadakan pameran dan promosi hasil kerajinan yang diikuti oleh 20 perusahaan industri kerajinan, pameran misi dagang dan industri, pengiriman promosi wisata, bantuan gempa bumi pada 27 Mei tahun 2006 (Kyoto adalah pemerintah asing yang pertama kali memberi bantuan).
- m. Program *Te Collabo* pada tahun 2007 yang fokus pada pengembangan UKM pasca-gempa di Yogyakarta. Industri kecil

dan menengah yang terpilih adalah pengrajin batik Imogiri, pengrajin batik kayu lurik Krpyak, dan pengrajin tenun serat alam Gamplong yang mayoritas adalah korban bencana gempa bumi pada 27 Mei tahun 2006.

- n. Fasilitas persetujuan kerja sama antara Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang, pada tahun 2011.

Untuk menangani hal-hal teknik terkait dengan kerja sama tersebut, dibentuklah suatu Komite Bersama yang beranggotakan para pejabat dari kedua belah pihak. Namun, Komite Bersama (*Joint Committee*) yang telah dibentuk belum optimal. Kesulitan juga ditemukan dalam mengembangkan program kerja sama ke arah pengembangan. Kemudian perbedaan jadwal anggaran juga menyebabkan penyusunan atau pelaksanaan program tahunan (pada tahun 2004) mengalami kesulitan.⁷¹

Pada perjalanannya, kerja sama antara kedua Provinsi ini masih ditemukan kendala, antara lain belum optimalnya kinerja komite bersama yang telah terbentuk, pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan petugas yang pernah mengikuti pelatihan di Kyoto tidak maksimal, serta belum ada mekanisme pelaporan terhadap penyelenggaraan kerja sama, sehingga tidak bisa diketahui perkembangan kerja sama ini. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan kedua Provinsi ini. Walaupun begitu, menurut penulis posisi DIY lebih diuntungkan, karena Kyoto notabene lebih kuat posisinya untuk membantu DIY.

⁷¹ *Ibid*, hal. 113.

2. Kerja Sama *Sister Province* DIY Dengan Negara Bagian California, Amerika Serikat.

Kerja sama Provinsi Kembar (*Sister Province*) antara Negara Bagian California dengan Provinsi DIY, dituangkan ke dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU tersebut ditandatangani Oleh Sri Paku Alam VIII, selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi DIY kala itu, dan Bill Lockyer, Presiden Pro Tempore Senat Negara Bagian California. Dalam acara yang sama juga disepakati pula MoU kerja sama antara “Kamar Dagang” kedua belah pihak, yang ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, selaku Ketua Kadin Yogyakarta kala itu, dan Mr. Kirk West, President California Chamber of Commerce, pada tanggal 25 Agustus 1997 di Sacramento, California, Amerika Serikat.

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mengembangkan pembangunan antara Provinsi DIY dan Pemerintah Negara Bagian California. Adapun bidang-bidang yang dikerjasamakan meliputi bidang seni dan kebudayaan, pendidikan, iptek, ekonomi dan perdagangan, investasi, industri, pariwisata, pertanian, lingkungan hidup, serta bidang-bidang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pada bulan Oktober 1997, sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU tersebut, Negara Bagian California berencana untuk melakukan kunjungan balasan ke Provinsi DIY, namun karena stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Indonesia, maka delegasi Negara Bagian California membatalkan kunjungannya dan selanjutnya tidak ada aktivitas apa pun dari kerja sama ini. Sejak terjadinya krisis multidimensional yang berlanjut pada situasi dan

kondisi yang tidak menentukan di Indonesia, menyebabkan kerja sama ini mengalami stagnansi.⁷²

Kemudian meninggalnya Senator Milton Marks anggota Senat California, yang menjadi penggerak utama kerja sama, ditengarai sebagai penyebab utama dan tidak berjalannya kegiatan. Untuk mengaktifkan kembali kerja sama perlu adanya pemrakarsa di lingkungan legislatif (anggota senat) dan seorang warga setempat yang bersedia menjadi perwakilan untuk menangani kerja sama dimaksud. Kurangnya sosialisasi dan belum adanya *Joint Committee* (Komite Bersama) dan *contact person*, juga dirasa sebagai hambatan. Padahal posisi DIY sebenarnya diuntungkan, karena tentunya California justru membantu DIY.

Selanjutnya dalam hubungan tersebut, John Drews, *Consultant Sub Committee on Asia Trade and Commerce*, Senat California, pada 15 Juli 2002 berkunjung ke Yogyakarta untuk membicarakan masalah pengaktifan kembali kerja sama *sister province* DIY-Negara Bagian California dengan pejabat terkait Pemerintah Provinsi DIY serta menyerahkan surat dari Senat California kepada Gubernur DIY. Sejak diresmikan, baru satu kegiatan ini yang telah dilaksanakan, yaitu penerimaan kunjungan delegasi bisnis dari California tersebut.

Sampai dengan MoU kerja sama ini berakhir pada tanggal 25 Agustus 2002, kerja sama *sister province* DIY-California belum dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai akibatnya, tujuan serta manfaatnya belum dapat diwujudkan dan dirasakan dari kerja sama ini. Rencana untuk menghidupkan kembali kerja sama sebenarnya sudah diprogramkan pada tahun anggaran 2006. Bahkan pembiayaan pada tingkat gubernur dengan Duta Besar RI di

⁷² *Ibid*, hal. 128

Washington sudah dilakukan. Namun demikian, berhubung terjadi bencana gempa bumi pada 27 Mei 2006, rencana kegiatan yang dimaksud belum bisa dilakukan kembali.⁷³

3. Kerja Sama *Sister Province* DIY Dengan Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan

Kerja sama antara Provinsi DIY dan Provinsi Gyeongsangbuk diresmikan dan ditandatangani Memoramandum of Understanding oleh Gubernur DIY dan Gubernur Gyeongsangbuk pada tanggal 24 Febuari 2005 di Kraton Yogyakarta. Program-program kerja sama yang disepakati dalam MoU adalah bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan seni, pertanian, pariwisata, perdagangan, industri serta investasi.

Kronologis kerja sama antara Provinsi DIY dan Provinsi Gyeongsangbuk adalah sebagai berikut; Tanggal 15 Januari 2001, BAPPEDA DIY menerima kedatangan 2 (dua) utusan dari Provinsi Gyeongsangbuk (Mr. Sang-Gon Kim dan Mr. Lee Jung Woo, *staff of Internasional Trade Devision*, Provinsi Gyongsangbuk) yang bermaksud menyerahkan surat dari Gubernur Provinsi Gyongsangbuk kepada Gubernur DIY. Isi surat dari Gubernur Gyongsangbuk adalah perkenalan dan kemungkinan kerja sama dengan Provinsi Gyongsangbuk. Selanjutnya, tanggal 16-17 Januari 2001 Mr. Sang-Gon Kim cs. Meninjau beberapa obyek (wisata dan industri) di DIY di antaranya Proyek Pengembangan Partai Selatan. Gubernur DIY menerima Mr. Sang-Gon Kim cs. Di Kraton pada tanggal 18 Januari 2001. Dari pembicaraan dengan Mr. Sang-Gon Kim menyatakan tertarik dan berkeinginan ikut serta dalam Program Pengembangan Partai Selatan.

⁷³ *Ibid*, hal. 129.

Tanggal 14 Februari 2001, Gubernur Provinsi Gyongsangbuk (Mr. Lee, Eui-Geum) mengirim surat kepada Gubernur DIY melalui utusan pribadi (Mr. Tae-Hyun, Lee, *Director of International Trade Division*, Provinsi Gyongsangbuk) yang berupa tawaran kerja sama Provinsi Gyongsangbuk kepada Provinsi DIY, dan undangan kepada Gubernur DIY untuk mengunjungi Provinsi Gyongsangbuk dalam rangka peninjauan obyek-obyek kerja sama dan realisasi kerja sama (penandatanganan MoU). Tanggal 20 Februari 2001 Gubernur DIY mengirim balasan kepada Gubernur Provinsi Gyongsangbuk yang isinya merespon secara positif tawaran kerja sama, namun meminta waktu penundaan kunjungan ke Provinsi Gyongsangbuk.⁷⁴

Sementara itu, hubungan telepon telah dilakukan antara Sekretaris Gubernur Gyongsangbuk dengan Sekretaris BAPPEDA-DIY mengenai rencana kunjungan Gubernur DIY. Sehubungan dengan hal tersebut, tanggal 2 Maret 2001 Mr. Tae-Hyun, Lee mengirim surat kepada Sekretaris BAPPEDA bahwa Gubernur DIY diharapkan dapat berkunjung ke Provinsi Gyongsangbuk pada tanggal 12-13 April 2001. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, tanggal 6-10 September 2003, delegasi DIY berkunjung ke Gyeongsangbuk dalam rangka penandatanganan *Letter of Intent* (Lol) antara Provinsi DIY dan Provinsi Gyeongsangbuk. Lol ditandatangani pada tanggal 9 September 2003 oleh Paku Alam IX (Wakil Gubernur DIY) dan Lee, Eui Geun (Gubernur Gyeongsangbuk DO Korsel) di Korea Selatan. Proses berikutnya adalah pada tanggal 17 Februari 2004, Gubernur Gyeongsangbuk melalui surat Bapak Abdul Nasir, warga Negara Korea Selatan, selaku *Honorary Advisor of Gyeongsangbuk-do for International Cooperation* memberitahukan keinginannya akan

⁷⁴ Takdir Ali Mukti., *Paradiplomacy... Op cit*, hal. 261.

melakukan kunjungan balasan ke Yogyakarta pada bulan Maret 2004 untuk membicarakan dan mendatangi kerja sama *sister province*. Delegasi Tim Advance Gyeongsangbuk-do Korsel berkunjung ke Yogyakarta untuk membahas draf MoU pada tanggal 27-31 Januari 2005.

Tanggal 24-26 Februari 2005, Gubernur Gyeongsangbuk-do Korsel bersama delegasi yang berjumlah 12 (dua belas) orang berkunjung ke Yogyakarta dalam rangka penandatanganan MoU kerja sama *sister province*. Pada tanggal 25 Februari 2005, sore sekitar jam 16:00-18:00 WIB, negosiasi tentang ‘nama’ persetujuan kerja sama kedua Provinsi masih belum ‘deal’. Sebab pihak Indonesia, yang dalam hal ini Provinsi DIY, menginginkan penggunaan istilah ‘*Memorandum of Understanding*’ atau MoU, namun pihak Korea, menginginkan nama persetujuan kerja samanya adalah ‘*agreement*’, dengan alasan bahwa MoU adalah ‘*non legal binding*’. Masalah ini dapat diatasi setelah ada loby-loby pada tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, MoU antara kedua provinsi dapat ditandatangani oleh Hamengku Buwono X (Gubernur DIY) dan Lee, Eui Geun (Gubernur Gyeongsangbuk Do Korsel) pada tanggal 25 Februari 2005 di Kraton Yogyakarta.⁷⁵

Setelah penandatanganan MoU tersebut, Tim Teknis atau ‘*joint committee*’ berhasil merencanakan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, meskipun akhirnya terpaksa harus ditunda 2 tahun karena ada bencana gempa bumi. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka kerja sama antara Provinsi DIY dengan Gyeongsangbuk-Do antara lain;⁷⁶

⁷⁵ *Ibid*, hal. 261.

⁷⁶ *Ibid.*, hal.264-266.

- a. Pengiriman seorang tenaga PNS yang bekerja di lingkungan Biro Kerja sama, Sdr. Imam, untuk mengikuti kursus Bahasa Korea selama 6 bulan, di Korea, tahun 2008.
- b. Kegiatan *Saemaul International Academy* 2008 di Kyungwoon University, Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan, Mei-Juni 2008. Provinsi DIY mengirimkan 16 orang untuk mengikuti program ini, termasuk penulis sendiri, bersamaan dengan kunjungan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwana X, ke Gyeongsangbuk-Do
- c. Inisiasi kontak-kontak bisnis dan investasi antara para pengusaha Korea dan para pengusaha di Yogyakarta.
- d. Bantuan sarana fisik dan Program pemberdayaan masyarakat di Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, dengan membangun fasilitas fisik berupa Gedung Saemaul sebagai sarana sosialisasi dan pencerahan masyarakat desa agar menerapkan prinsip-prinsip hidup yang berkerja keras, disiplin dan bergotong royong. Bangunan gedung ini bernilai sekitar Rp. 1,5 milyar bantuan dari Korea Selatan, dengan dana pendampingan dari Provinsi DIY, tahun 2009.
- e. Kegiatan *Korean Youth Saemaul Volunteer* di Desa Kampung, Ngawen, Gunungkidul, yang diisi dengan bakti sosial di bidang kesehatan oleh para mahasiswa dari Korea Selatan, sekaligus meresmikan penggunaan Gedung Saemaul di desa tersebut, tahun 2009.
- f. Kegiatan *Saemaul International Academy* 2011 di Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan, sebagai kelanjutan program sebelumnya. Provinsi DIY mengirimkan delegasi untuk mengikuti program ini.

- g. Kegiatan *Korean Youth Saemaul Volunteer* 2011 di Desa Karangtalun, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, yang diisi dengan bakti sosial di bidang kesehatan oleh para mahasiswa dari Korea Selatan, pada 18-30 Juli 2011.
- h. Fasilitas kunjungan delegasi DPRD Gyeongsangbuk-Do ke DPRD Provinsi DIY pada tanggal 20 September 2011, dengan menghasilkan Nota Kesepakatan antara kedua lembaga parlemen daerah tersebut.
- i. Fasilitas Kerja sama bisnis dan investasi antara para pengusaha dari Korea Selatan dengan para pelaku usaha di DIY. Hasilnya beberapa investasi dari Korea Selatan seperti pabrik *wig* (rambut palsu), industri *lingerie* (keduanya untuk export), serta *real estate* (perumahan) berdiri di DIY dengan menyerap ribuan tenaga kerja. Fasilitas ini telah berlangsung sejak awal dibukanya kerja sama kedua provinsi.

Dari serangkaian program dan kegiatan tersebut, tampak jelas manfaat dari kerja sama luar negeri antara Provinsi DIY dengan Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan ini. Beberapa di antaranya adalah;⁷⁷

- a. Meningkatnya jalinan persahabatan antara Provinsi DIY dengan Gyeongsangbuk-Do, dan para skala yang lebih luas adalah persahabatan antara RI dengan Republik Korea.
- b. DIY memperoleh bantuan fisik gedung senilai jutaan rupiah, sebab program itu secara bertahap akan mencapai jumlah sekitar Rp.5 Milyar, termasuk untuk membiayai kegiatan dalam gedung itu pada tahun-tahun berikutnya.

⁷⁷ *Loc. Cit.*, hal. 266.

- c. Terjalannya hubungan bisnis dan investasi yang semakin meningkat antara kedua Provinsi, baik di sektor jasa maupun industri barang, dan perdagangan. Secara kuantitatif dapat diukur dari peningkatan volume perdagangan dari investasi kedua Provinsi yang meningkat setelah adanya Kerja sama.
- d. Masyarakat Yogyakarta, khususnya Desa Kampung, Ngawen, Gunungkidul, memperoleh suntikan spirit untuk menerapkan prinsip-prinsip Saemaul Undong atau Gerakan Pembaharuan Desa sehingga dapat merubah perilaku dan cara kerja mereka sehari-hari sehingga akan mempengaruhi masa depan mereka yang lebih baik di kemudian hari. Perubahan cara berpikir dan cara bekerja masyarakat ini sangat besar nilainya dibandingkan dengan bantuan fisik yang telah diberikan oleh Gyeongsangbuk-Do.

4. Kerja Sama *Sister Province* DIY Dengan Provinsi Ismailia, Mesir

Kerja sama antara Provinsi DIY dengan Provinsi Ismailia, Mesir dituangkan dalam sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Sri Paku Alam VIII, Wakil Gubernur DIY, dan Ahmed A. Mohamed Coueli, Gubernur Ismailia pada tanggal 24 Desember 1991 di Yogyakarta. Hubungan kedua Provinsi ini didasarkan atas kesamaan potensi wilayah yang merupakan daerah wisata budaya. Posisi Ismailia yang juga strategis sebagai pintu gerbang pariwisata dari Eropa. Adapun kerja sama antara Provinsi DIY dengan Provinsi Ismailia mencakup:⁷⁸

⁷⁸ Lihat *Inventarisasi dan Evaluasi Naskah kerja sama Pemerintah Provinsi DIY dengan Pihak Luar Negeri*, Program kerja sama Pemerintah Provinsi DIY dengan Ismailia, Mesir, Bahan Acara Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 2004 mengenai Rencana Kerja sama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pihak Lain, Yogyakarta 2004.

- a. Bidang perdagangan. Meliputi pertukaran informasi pasar, pameran promosional bersama dalam rangka menggalakan usaha perdagangan.
- b. Bidang pariwisata, melakukan pertukaran informasi mengenai pariwisata.
- c. Bidang teknologi. Meliputi pertukaran informasi teknologi dan pertukaran kesempatan belajar dan juga penelitian.
- d. Bidang industri, melakukan pertukaran tentang industri yang potensial.
- e. Bidang pendidikan dan kebudayaan. Meliputi pertukaran pameran lukisan, pertukaran pertunjukkan kebudayaan, pertukaran arus informasi yang berkaitan dengan pendidikan, pengembangan generasi muda, dan pengiriman tugas belajar.⁷⁹

Walaupun begitu, kerja sama DIY dengan Ismailia tidak berjalan dengan baik. Kerja sama ini ibaratnya mati segan hidup pun tak mau. Sampai saat ini walaupun telah tersusun program kerja sama, namun pelaksanaannya belum dapat direalisasikan dan baru satu kegiatan yang telah diselenggarakan; yaitu pengiriman misi budaya Provinsi DIY ke Ismailia. Hal itu dikarenakan kendala penyusunan program kerja yang tidak detail dan tidak jelas; kurangnya sosialisasi; belum tersedianya biaya di pihak Ismailia; tidak jelasnya kedudukan masing-masing dalam kerja sama; kurangnya komunikasi yang intensif antarkedua negara.

Secara konkrit belum ada hasil yang dapat diambil, namun ada harapan dengan dihidupkan kembali program kerja sama antara Provinsi DIY dengan Provinsi Ismailia, yaitu menindaklanjuti

⁷⁹ Agustinus Supriyanto & Andi Sandi A.T.T., *Pengembangan Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kerja sama Sister Provinsi*. *Op cit*, hal. 23.

program kerja sama yang pernah dibangun namun sempat mengalami stagnansi; dapat mempromosikan pariwisata dan budaya melalui forum kerja sama, dengan cara tukar-menukar kunjungan pelajar kedua Provinsi; kemudian ada kemungkinan dikembangkannya kegiatan-kegiatan pada sektor lain dalam rangka mendukung otonomi daerah. Dalam hal kerja sama dengan Ismailia, dapat dikatakan DIY berada dalam posisi membantu Ismailia.⁸⁰ Provinsi DIY sedikit tidak diuntungkan dari kerja sama ini.

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu daerah yang aktif dalam menjalin kerjasama luar negeri dengan pihak asing. Kerja sama itu meliputi Kerja sama 'sister Province/city' dengan asing provinsi lain, maupun kerja sama itu telah dirintis jauh sebelum erah otonomi daerah karena adanya kedekatan antara para pemimpin di DIY dengan Pemimpin di Negara asing, misalnya kedekatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana IX dengan Gubernur Kyoto Prefektur, Jepang, yang dulunya pernah melakukan tugas militer di Yogyakarta, dan kerja sama DIY dengan Provinsi Ismailiya, Republik Arab Mesir.

Setelah erah otonomi daerah, perluasan kerja sama Pemprov DIY dengan provinsi-provinsi luar negeri atau swasta asing terus berkembang, antara lain dengan Provinsi Tyrol, Austria Tahun 1999, Suruga Miyagawa Company Tahun 2001, Berndhard Ltd, Malaysia, Tahun 2003, Chugcheongnam-Do, Korea Selatan Tahun 2004, dengan Provinsi Geongsangbuk-Do, Korea Selatan, Tahun 2005, dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, Tahun 2007, Kerja sama dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan Tahun 2009, Kerja sama khusus bidang kesehatan dengan Medical Peace Fundation (MPF), Korea

⁸⁰ Alan S Anggara. *Yogyakarta Sister City. Op. Cit.*, hal. 121.

Selatan, Tahun 2007, dengan Provinsi Saint Petersburg, Rusia, Tahun 2010 (latter of intent).⁸¹ dengan Juma' Al Majid Center untuk Peradaban dan Warisan Budaya di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Orientalisches Institute Universitiet Leipzig, Jerman di bidang Ilmu dan Budaya, DIY dengan Dongbu Engineering Korea tahun 2012, DIY dengan Pemerintah Kayseri, Turki 2013.

5. Kerja Sama *Sister Province* DIY Dengan Provinsi Tyrol, Austria.

Kerja sama sister province antara Provinsi DIY dan Provinsi Tyrol, Austria dinyatakan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DIY dengan Gubernur Tryol, tanggal 30 November 1999 di Innsbruck, Austria. Kedua Gubernur mengemukakan besarnya harapan agar MoU yang merupakan kerja sama secara formal ini agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk yang lebih detail dan realistis. Sesuai dengan kesepakatan dalam MoU, maka kemudian telah dilakukan tindak lanjut berupa pembentukan forum kerja sama yang disebut sebagai Kelompok Kerja Bersama yang meliputi menyiapkan kriteria anggot forum dan sekaligus pembentukan kelompok kerja yang anggotanya tetap dan bukan instansional pada tahun 2000.

Kerja sama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan dan meningkatkan pendayagunaan kemitraan dan kerja sama. Adapun bidang-bidang yang dikerjasamakan meliputi bidang ekonomi-perdagangan, iptek, industri, pariwisata, dan kebudayaan. Hasil yang telah dicapai dari kerja sama di antaranya:⁸²

⁸² *Ibid*, hal.124.

- a. Pengiriman expert (tenaga ahli) bidang industri kerajinan Swarovski. Tertuang dalam kerja sama perdagangan industri kerajinan dari DIY, yang kemudian manfaatnya dapat mendorong promosi dan meningkatkan nilai tambah bagi industri kerajinan topeng, perak, dan Kristal.
- b. Pengiriman dokter puskesmas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan masyarakat. Manfaat yang diperoleh yaitu untuk meningkatkan kemampuan dokter di bidang kesehatan masyarakat.
- c. Pertukaran informasi tentang otonomi daerah, yang dapat meningkatkan wawasan para pejabat DIY tentang pelaksanaan otonomi daerah terutama yang menyangkut keuangan daerah. Universitas Innsbruck di Austria telah mempunyai beberapa ahli organisasi industri dan keuangan daerah yang bersedia membantu melakukan restrukturisasi keuangan dan organisasi di DIY, karena pada dasarnya Austria mempunyai sistem keuangan daerah yang sangat demokratis yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal ke dalam sistem keuangan daerah.
- d. Bantuan teknis pengembangan sistem transportasi darat (trem). Dengan begitu, tersedia rencana induk pengembangan transportasi darat (trem) Kota Yogyakarta.
- e. Peningkatan kualitas manajemen destinasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Adanya pembentukan Institut Pariwisata Yogya berkerja sama dengan Unibersitas Innsbruck sebagai partner utama. Kemudian pertukaran penelitian, pengembangan dan pemasaran pariwisata di Yogyakarta untuk dijadikan objek bersama dengan *Tourism Department* di Tyrol waktu itu.

f. Pemprov DIY menerima hibah satu unit motor Tossa, satu unit motor roda dua, dan peralatan rumah sakit seperti peralatan ruang rawat inap untuk Puskesmas Semanu, Gunungkidul.

Kerja sama antara DIY dengan Tyrol dapat berjalan karena kelembagaan-kelompok kerja atau komite bersama yang menangani kerja sama ini dapat berjalan. Juga posisi Tyrol yang sama kuatnya dengan Kyoto, dan tentunya DIY diuntungkan dari kerja sama ini, karena posisi Tyrol yang membantu DIY. Namun, sebenarnya kerja sama DIY-Tyrol ini mengalami kendala, yaitu keterbatasan dana dan kelompok kerja atau komite bersama juga dirasa belum efektif kinerjanya. Sampai saat penulis melakukan penelitian ini, belum ada tindak lanjut kegiatan lagi dari kerja sama DIY dengan Tyrol.

6. Kerja Sama *Sister Province* DIY Dengan Suruga Miyagawa Company, Jepang

Kerja sama antara Pemerintah Propinsi DIY dan Suruga Miyagawa Company, Jepang, yang meliputi Kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia, Industri dan Perdagangan, Pertanian serta Investasi, ditandatangani oleh Presiden Direktur Suruga Miyagawa, MS. Shizuko Miyagawa dan Gubernur DIY, pada tanggal 2 Juli 2003.

Untuk merealisasikan kerja sama itu, melalui Keputusan Gubernur DIY No: 20 Tahun 2004, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditunjuk untuk melaksanakan program Pengembangan sumber Daya Manusia dengan Suruga Miyagawa Company Japan melalui kegiatan pemanganan ke jepang bagi para tenaga kerja professional atau calon tenaga kerja dari provinsi DIY.

Pemanganan merupakan suatu proses pendidikan dan pelatihan secara sistematis yang terorganisir yang berlaku secara terpadu dan

berjenjang di Lembaga Pendidikan dan pelatihan dan dengan bekerja secara langsung dalam proses produksi atau jasa di perusahaan agar peserta memiliki keterampilan dan kompetensi bagi suatu profesi tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di mana peserta magang dan dunia usaha terkait kontrak pemangangan. Tujuan pemangangan adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan teknik para peserta magang di perusahaan kecil dan menengah, sehingga setelah kembali ke Indonesia mampu berperan aktif untuk membangun industri di Indonesia. Di samping itu program ini bertujuan untuk membentuk sikap dan etos kerja agar lebih produktif dalam rangka perluasan lapangan kerja/ kesempatan kerja serta untuk kesejahteraan keluarga dan peserta.⁸³

Pengumuman pendaftaran dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2004, memuat tentang tempat pendaftaran, waktu pendaftaran, persyaratan administrasi dan persyaratan fisik. Tempat pendaftaran bertempat di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY, dimulai tanggal 15 maret 2004 sampai 27 Maret 2004. Dari hasil rekrut dan seleksi tahun 2004 yang dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui proses seleksi administrasi, kesempatan, psikotes dan wawancara serta medical chek up sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan perincian perempuan 3 orang, 33 (tiga puluh tiga) orang.

Untuk mengetahui perkembangan peserta magang dilaksanakan evaluasi berkala seminggu sekali dan untuk menentukan kelulusan peserta pelatihan dilaksanakan evaluasi akhir. Evaluasi dilaksanakan oleh tim Gabungan antara Suruga Miyagawa Company Japan, Instruktur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY.

⁸³ Takdir Ali Mukti. *Paradiplomacy. Op. Cit*, hal. 271.

Bagi peserta pelatihan yang memenuhi syarat diberikan Sertifikat Balai Latihan kerja Yogyakarta dan berhak untuk mengikuti pemagangan di Jepang yang pemberakatanya dilakukan secara bertahap dimulai pada akhir bulan Mei tahun 2004 sebanyak 11 (sebelas) orang dan sisanya akan ditentukan kemudian.

Presiden Suruga Miyagawa Company, MS. Shizuko Miyagawa Shizuko, bersama beberapa pengusaha dari Jepang berkunjung ke Yogyakarta pada tanggal 14-17 Juni 2005 untuk mencari peluang berinvestasi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Rombongan yang berkunjung sebanyak 15 (lima belas) orang yang berasal dari berbagai bidang, antara lain : Perakitan Sparepart Mobil, Pengelolaan Air, Sosial, Asuransi. Garment, Elektrikal Otomotif, Konstruksi, Developer, dan Packing.⁸⁴

Kegiatan yang dilakukan selama kunjungan ke Yogyakarta adalah courtesy call dengan Gubernur DIY, Kunjungan ke Pemda Sleman, Kunjungan ke berbagai obyek wisata serta melakukan kunjungan pendidikan Latihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY di Kaliurang untuk melakukan seleksi calon tenaga kerja magang yang akan dikirim ke Jepang, selain itu juga mengunjungi lokasi calon panti Jompo Kaliurang, SLB Panti Asih Kaliurang, dan Pusat Rehabilitasi dan pengobatan Yakum, untuk melihat sarana dan prasarana yang berkaitan dengan rencana Surugawa Miyagawa untuk membangun panti Jompo di Yogyakarta.

Dalam kunjungan tersebut juga di agendakan pertemuan dengan Dinas, Instansi dan Lembaga Terkait (BAPEDDA Provinsi DIY, Pemda.Kab. Sleman dan Pemda Kab. Kulon Progo untuk membahas peluang berinvestasi di Yogyakarta. Dalam

⁸⁴ *Ibid*, hal. 273.

pertemuan tersebut para investor/pengusaha Jepang ingin mengetahui lebih jauh mengenai potensi dan peluang investasi di DIY termasuk kebijakan Investasi terutama mengenai Tatacara prosedur investasi asing, ketenagakerjaan, Hukum dan Perpajakan, Prosedur Perjanjian, Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses perijinan.

Pada tahun 2008, dilakukan fasilitasi dan koordinasi penandatangan pernyataan minat antara Surugawa Miyagawa dengan Dinas Kesehatan Provinsi DIY terkait dengan rencana kebutuhan tenaga perawat manula di Jepang sebagai kelanjutan Kerja sama antara pihak Miyagawa Provinsi DIY.

Dari sisi manfaat, maka kerja sama dengan Suruga Miyagawa sangat memberikan keuntungan bagi provinsi DIY terutama dalam kaitannya dengan perluasan lapangan kerja dan penyiapan tenaga kerja muda yang terampil dan professional. Di samping itu, terjadi saling tukar informasi bisnis dan investasi antara penguasa Jepang dan penguasa Yogyakarta sehingga kerja sama pemerintah provinsi DIY dengan lembaga non-pemerintah, namun kegiatan dan fungsi kerja samanya dapat berdampak baik bagi hubungan antar pemerintah juga.

7. Kerja Sama *Sister Province* DIY Dengan Provinsi Saint Petersburg, Rusia.

Kerja sama *sister province* antara Provinsi DIY dengan Provinsi Saintn Petersburg, Rusia dituangkan dalam bentuk surat Pernyataan Kehendak atau Letter of Intents (Lol). Lol itu ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY, dan Valentina Matvienko, Gubernur Saint Petersburg, pada tanggal 31 Mei 2010 di Saint Petersburg, Rusia.⁸⁵

⁸⁵ Alan S Anggara. *Yogyakarta Sister City. Op. Cit*, hal. 148.

Adapun tujuan dari dibuatnya Lol ini adalah untuk mempererat hubungan persahabatan dan untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai bidang kerja sama yang disepakati. Bidang-bidang yang dikerjasamakan antara lain bidang ekonomi, industri, iptek, kebudayaan, dan pariwisata.

Telah ada upaya untuk melakukan peningkatan kerja sama antara Saint Petersburg dengan Provinsi DIY ke dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), namun masih blum juga terealisasi sampai saat penulis melakukan penelitian ini. Karena masih menunggu finalisasi kajian oleh mitra kerja sama, dalam hal ini pihak Saint Petersburg, Rusia. Belum ada manfaat yang diperoleh, karena memang Lol tersebut belum ada tindak lanjutnya sampai dengan saat ini.⁸⁶

8. Kerja sama *Sister Province* DIY Dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand

Kerja sama *sister province* antara Provinsi DIY dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). MoU itu ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY, dan Vilas Rujiwattanapong, Pejabat Gubernur Provinsi Chiangmai, Thailand, pada tanggal 4 September 2007 di Chiang Mai, Thailand. Masa kerja sama ini adalah lima tahun.

Adapun tujuan dari dibuatnya MoU ini adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan berdasarkan pada kesetaran dan saling menguntungkan sesuai bidang kerja sama yang disepakati. Bidang-bidang yang dikerjasamakan antara lain.⁸⁷

⁸⁶ Lihat *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2011, Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2012*, DPRD Provinsi DIY, hal VI-3.

⁸⁷ Alan S Anggara. *Yogyakarta Sister City. Op Cit.* Hal. 149.

- a. Bidang pertanian. Pengembangan tanaman hortikultura termasuk teknologi pengembangan bibit atau benih ikan serta pemasarannya.
- b. Bidang sosial. DIY dapat mengirimkan penyandang difabel (khususnya penyandang cacat kaki) untuk belajar di Yayasan Prosthese.
- c. Bidang industri. Pengembangan *One Tambon One Product*. Dengan adanya kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan industri kecil khususnya kerajinan tangan.
- d. Bidang pariwisata. Adanya paket promosi bersama anggota EATOF dan rencana jalur penerbangan langsung Yogyakarta-Jakarta-Bangkok.
- e. Bidang pendidikan. Penandatanganan MoU kerja sama di bidang pendidikan antara Universitas Gajah Mada dengan Universitas Chiang Mai, dengan kegiatan berupa pertukaran pelajar, akademisi, informasi akademik, penelitian, seminar, kuliah bersama, pengembangan program Gelar Ganda atau *Double Degree*, dan aktivitas akademik lainnya.

Sampai ini, kerja sama *sister province* Provinsi DIY dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, yang telah berusia lebih dari enam tahun sejak ditandatanganinya MoU tersebut, kerja sama ini tidak ada tindak lanjutnya, dan tidak terlalu produktif. Kerja sama ini justru menghadapi beberapa kendala di antaranya belum adanya penanggung jawab (*contact person*) yang secara langsung menangani kerja sama tersebut, juga kondisi keamanan dan perpolitikan yang tidak stabil yang belum lama ini terjadi di Thailand.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid*, hal. 151,

9. Kerja Sama *Sister Province* DIY Dengan Provinsi Shanghai, Tiongkok

Kerja sama *sister province* antara Provinsi DIY dan Provinsi Shanghai, Tiongkok dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intents* (Lol). Lol itu ditandatangani oleh Ichsanuri, Sekretaris Daerah Provinsi DIY, dan Li Mingjun, *Director General Shanghai Municipal Foreign Affairs Office*, Tiongkok, pada tanggal 12 Oktober 2013 di Yogyakarta.

Tujuan dari dibuatnya Lol ini adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi dari kedua provinsi guna mendukung kerja sama yang saling menguntungkan sesuai bidang kerja sama yang disepakati. Adapun bidang-bidang yang dikerjasamakan antara lain bidang ekonomi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, iptek, lingkungan, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati oleh para pihak.

Kerja sama *sister province* antara Provinsi DIY dengan Provinsi Shanghai, Tiongkok, terhitung sudah satu tahun sejak ditandatanganinya Lol tersebut, belum ada tindak lanjutnya. Belum ada manfaat yang diperoleh, karena memang Lol tersebut belum ada tindak lanjutnya.

10. Kerja Sama *Province* DIY Dengan Provinsi Kayseri, Turki

Kerja sama *sister province* antara Provinsi DIY dan Provinsi Kayseri, Turki masih dalam bentuk Surat Pernyataan Kehendak atau *Letter of intents* (LOI). LOI itu ditandatangani oleh Hamengkubuwono X, Gubernur Provinsi DIY, dengan Serif Yilmatz, Gubernur Kayaseri, Turki, pada bulan April tahun 2013 di Kayaeri, Turki.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, hal. 155.

Tujuan dari pembuatan LOI ini adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi dari kedua provinsi guna mendukung kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan kerja sama yang disepakati. Adapun bidang-bidang yang dikerjasamakan antara lain bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati oleh para pihak.

Kerja sama sister province antara Province DIY dengan Provinsi Kayseri, Turki terhitung belum genap setahun sejak ditandatangani LOI tersebut, sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Belum ada manfaat yang diperoleh, karena LOI tersebut belum ada tindak lanjutnya.⁹⁰

D. Analisis Kunjungan Delegasi Luar Negeri Pemda DIY.

Delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnyanya menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. delegasian merupakan hal yang penting dalam sebuah struktur, baik struktur organisasi maupun struktur pemerintahan, karena untuk memberi kesempatan kepada bawahan dalam melakukan sebuah training yang mewakili instansi atau lembaganya.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman perjalanan dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara kementerian luar negeri dan pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota perwakilan rakyat daerah. Dalam pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi "*Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN Kementerian Dalam Negeri dan*

⁹⁰ Ibid, hal. 156.

Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.” Pasal 2 Ayat (1). ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri. dalam Ayat (2) “ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.” Ayat (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹¹ dalam rangka:

- 1. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;*
- 2. pendidikan dan pelatihan;*
- 3. studi banding;*
- 4. seminar;*
- 5. lokakarya;*
- 6. konferensi;*
- 7. promosi potensi daerah;*

Kunjungan luar negeri sangat dibutuhkan dalam hal kerjasama daerah tergantung kebutuhan dan kepentingan daerah, jika kebutuhan daerah semakin mendesak maka daerah segerah mengirim surat ke kantor perwakilan luar negeri untuk merencanakan kunjungan dalam menyepakati peninjauan/ nota kesepakatan yang mau dilaksanakan. kunjungan luar negeri dilakukan Pemda sudah semestinya disepakati dari pihak luar negeri dan biasanya saling kunjungan balaasan. Contohnya, Yogyakarta dengan kyoto jepang yang sudah 30 tahun berjalan dan saling berkunjung antara Gubernur Kyoto dan pihak pemda Yogyakarta, seperti

⁹¹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman perjalan dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara kementerian luar negeri dan pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah,

Gubernur, DPRD dan instansi terkait. Dalam wawancara yang dilakukan penulis ke kasubbid administrasi publik BAPPEDA DIY, beliau mengatakan bahwa dalam rangka kunjungan luar negeri itu ada dua. yang pertama, adalah penjajakan. Yang kedua, Penandatanganan. Jumlah kunjungan antara kyoto, jepang dengan DIY selama ini pihak kyoto yang lebih banyak berkunjung ke yogyakarta ini disebabkan kepentingan jepang dalam mendatangkan ekspor. Kunjungan luar negeri sudah diatur dengan jelas dalam peraturan menteri dan berpedoman pada mekanisme undang-undang. Jadi dalam hal kunjungan luar negeri yang di lakukan pemerintah pusat maupun daerah tetap mengacu pada aturan yang berlaku. jumlah delegasi dalam kunjungan luar negeri untuk penajajakan bisanya 5 orang sedangkan dalam penandatanganan kesepakatan bisanya lebih dari 5 orang.